

**LAPORAN  
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
(SPAK)  
TRIWULAN II TAHUN 2024**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

## KATA ENGANTAR

Aparatur Pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa maupun media elektronika, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Aparatur Pemerintah.

Sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah sehingga dapat terwujud *good government* perlu adanya pengukuran kinerja Perangkat Daerah beserta Aparaturnya, agar dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan pencegahan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Perangkat Daerah itu sendiri.

Salah satu upaya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Semoga hasil survei ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan dan langkah-langkah selanjutnya.

Temanggung, 30 Juni 2024



OMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660608 199603 2 004

## BAB I KUESIONER SURVEI

Dalam melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) kepada Responden, kami mengajukan kuesioner survei yang berisi 5 (lima) pertanyaan, sebagai berikut:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya).

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamuflekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb).

5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

## **BAB II METODOLOGI SURVEI**

### **A. Kriteria Responden**

Responden dalam pelaksanaan survei persepsi antikorupsi adalah penerima layanan yang telah selesai menerima pelayanan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu bulan Mei sampai dengan Juli 2024. Adapun jenis pelayanan yang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berikan dapat berupa Fasilitator Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Desa-Desa di Wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung.

### **B. Metode Pencacahan**

Pengumpulan data jawaban responden dilakukan dengan cara memberikan kuesioner secara online kepada pengguna layanan yang telah selesai menerima pelayanan. Instrumen pengukuran persepsi antikorupsi dari responden atas pemberian pelayanan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 5 (lima) pernyataan. Nilai pernyataan dalam instrumen kuesioner ini terdiri atas pernyataan dalam skala 1- 6. Dimana responden diminta memberikan nilai antara 1 sampai dengan 6 pada setiap pernyataan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, menunjukkan bahwa responden semakin setuju bahwa integritas pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semakin baik.

### **C. Metode Pengolahan Data dan Analisis**

Terhadap jawaban responden selanjutnya ditabulasi untuk dihitung skor rata-rata jawaban responden pada setiap pernyataan, dan skor rata-rata jawaban responden untuk semua pernyataan.

Dari skor rata-rata jawaban responden atas semua pernyataan tersebut, kemudian dikonversi ke dalam skor Indeks Persepsi Antikorupsi dengan skala 4 (empat), dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPAK} = \text{Skor rata-rata} / 6 \times 4$$

Selain untuk mendapatkan skor IPAK, hasil tabulasi atas jawaban responden juga kami lakukan analisis untuk merumuskan rencana tindak lanjut perbaikan layanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jawaban responden yang masih memberikan nilai di bawah 6 (enam) pada setiap pernyataan akan sangat kami perhatikan untuk memberikan perbaikan pelayanan pada aspek yang terkait dengan pernyataan tersebut.

## BAB III PENGOLAHAN SURVEI

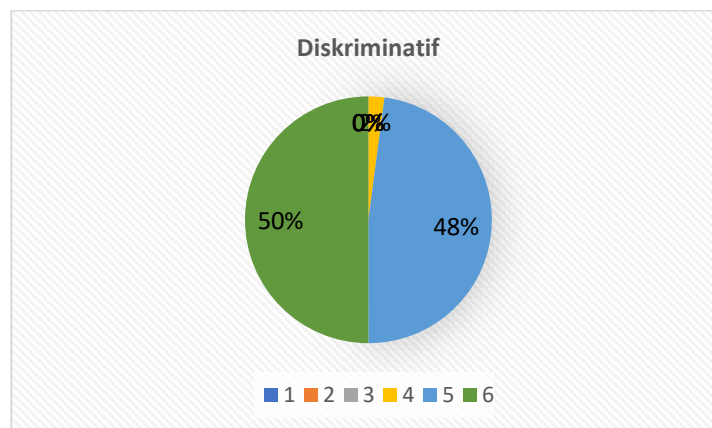
### 3.1. ANALISIS HASIL SURVEI

#### 3.1.1 Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator

##### a. Perilaku Diskriminatif

Persepsi responden diukur menggunakan instrumen pernyataan: “Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini”.

Berdasarkan pengolahan jawaban responden, diperoleh informasi sebagai berikut:

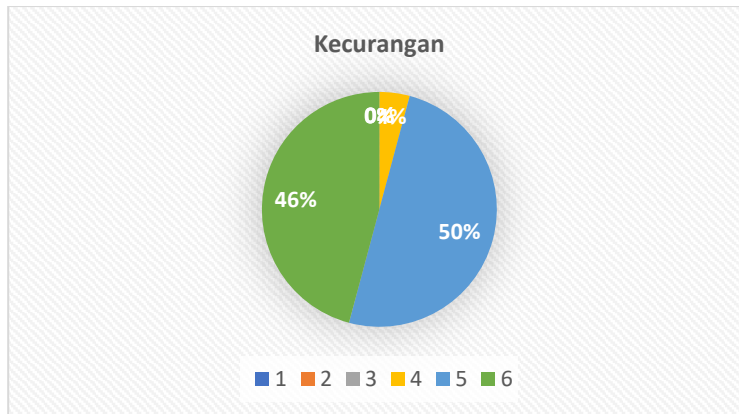


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada perilaku diskriminatif ini menunjukkan hasil pada index 3,65, dimana 50% responden menyatakan sangat setuju, 48% responden menyatakan setuju bahwa tidak ada diskriminasi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, namun demikian terdapat 2% responden yang menyatakan agak setuju bahwa tidak ada diskriminasi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

##### b. Perilaku Petugas Di Luar Prosedur Yang Ditetapkan (Kecurangan)

Persepsi responden diukur menggunakan instrumen pernyataan: “Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini”.

Berdasarkan pengolahan jawaban responden, diperoleh informasi sebagai berikut:

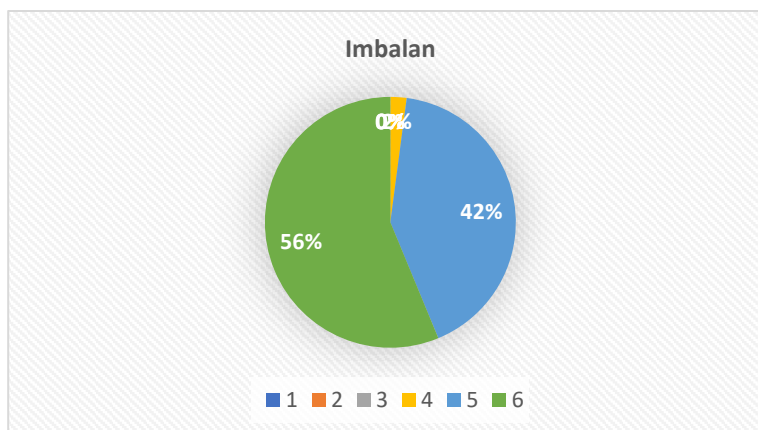


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada perilaku petugas di luar prosedur yang ditetapkan (kecurangan) ini menunjukkan hasil pada index 3,61, dimana 46% responden menyatakan sangat setuju, 50% menyatakan setuju, namun terdapat 4% responden menyatakan agak setuju bahwa tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

c. Perilaku Petugas Menerima Imbalan Uang / Barang

Persepsi responden diukur menggunakan instrumen pernyataan: "Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini".

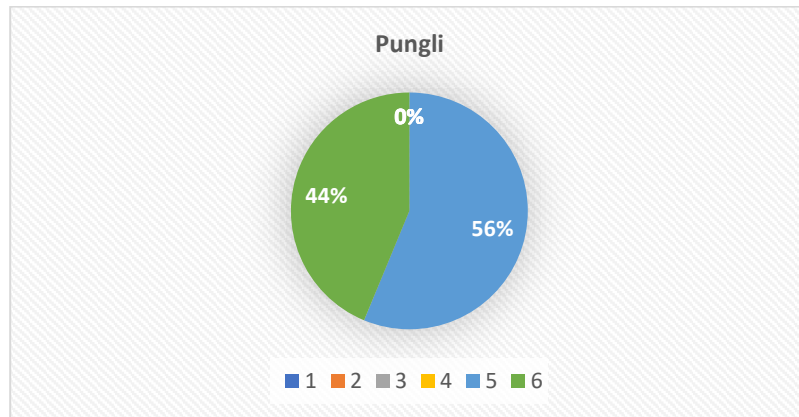
Berdasarkan pengolahan jawaban responden, diperoleh informasi sebagai berikut:



Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada perilaku petugas menerima imbalan uang / barang ini menunjukkan hasil pada index 3,69, dimana 56% responden menyatakan sangat setuju, 42% responden menyatakan setuju, dan terdapat 2% responden menyatakan agak setuju bahwa tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### d. Perilaku Pungutan Liar

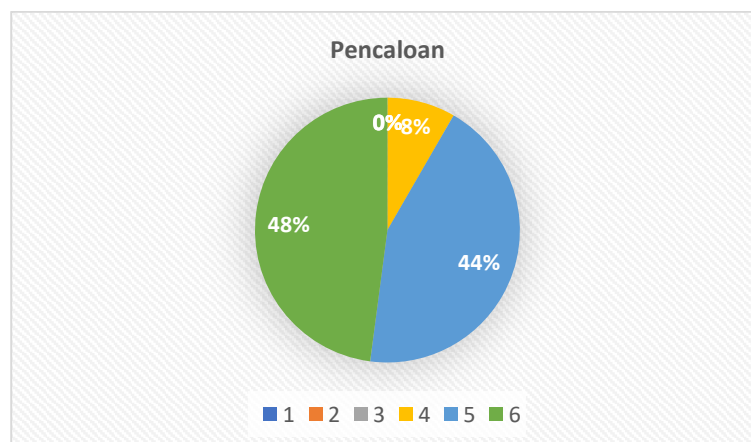
Persepsi responden diukur menggunakan instrumen pernyataan: "Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini". Berdasarkan pengolahan jawaban responden, diperoleh informasi sebagai berikut:



Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada perilaku pungutan liar ini menunjukkan hasil pada index 3,63, dimana 44% responden menyatakan sangat setuju, dan 56% responden menyatakan setuju bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### e. Perilaku Percaloan / Perantara

Persepsi responden diukur menggunakan instrumen pernyataan: "Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini". Berdasarkan pengolahan jawaban responden, diperoleh informasi sebagai berikut:



Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada perilaku percaloan / perantara ini menunjukkan hasil pada index 3,60, dimana 48% responden menyatakan sangat setuju, 44% responden menyatakan setuju dan 8% responden menyatakan agak setuju bahwa tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada Dinas Penanaman Modal dan pelayan Terpadu Satu Pintu.

Adapun rekapitulasi nilai rata-rata per Indikator dari Indeks Persepsi Anti Korupsi, sebagaimana Tabel berikut:

No	Indikator	Nilai Rata-Rata	Mutu Pelayanan
1	Perilaku Diskriminatif	3,65	A
2	Perilaku Petugas Di Luar Prosedur Yang Ditetapkan (Kecurangan)	3,61	A
3	Perilaku Petugas Menerima Imbalan Uang / Barang	3,69	A
4	Perilaku Pungutan Liar	3,63	A
5	Perilaku Percaloan / Perantara	3,60	A
<b>RATA-RATA</b>		<b>3,64</b>	

Dari indeks 5 indikator di atas, dapat diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung sebesar 3,64.

Jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks 3,64 tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**.

Tabel Persepsi Korupsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi Korupsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 - 1.75	25 – 43.75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	C	Kurang Bersih Dari Korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100	A	Bersih Dari Korupsi



### 3.2. TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

Adapun hasil dari analisa persepsi anti korupsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung diketahui bahwa nilai rata-rata indikator persepsi antikorupsi pada perilaku percaloan / perantara mencapai 3,60, merupakan nilai paling rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata indikator lainnya, disusul nilai rata-rata pada indikator perilaku petugas diluar prosedur/kecurangan sebesar 3,61, perilaku pungutan liar sebesar 3,6i, perilaku diskriminatif sebesar 3,65, dan Perilaku Petugas Menerima Imbalan Uang / Barang sebesar 3,69.

Berdasarkan hasil dari analisa persepsi antikorupsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu terus memperkuat system integritas sehingga benar-benar terwujud pelayanan yang anti percaloan / perantara dimana tidak ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll. Upaya yang akan terus dilaksanakan dan akan kami evaluasi, antara lain:

- a. Kampanye public secara gencar melalui pemasangan banner, berbagai media sosial dan sosialisasi ke Desa bahwa pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal pengurusan administrasi/konsultasi/penyampaian berkas untuk langsung datang bertemu dengan petugas yang membidangi.
- b. Kegiatan pembekalan integritas dilaksanakan setiap satu bulan sekali diikuti semua pegawai yang dipimpin Kepala Dinas.

## BAB IV DATA SURVEI

### 4.1 DATA RESPONDEN

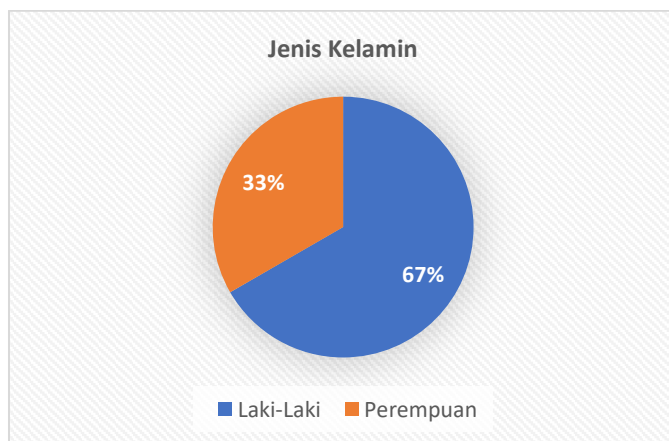
#### 1. Daftar Pengisian Kuesioner Persepsi Antikorupsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	NAMA	NOMOR HP	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN
1	Surzani	81326407343	Laki-laki	SLTA Sederajat
2	Yusuf Rahman Hidayat	81383055123	Laki-laki	SLTA Sederajat
3	REJIYONO	81244394119	Laki-laki	SLTA Sederajat
4	ARIF BUDI KURNIAWAN	85878735555	Laki-laki	SLTA Sederajat
5	Imam fahrudin	75729069265	Laki-laki	S1/DIV
6	haida sofa	85540487725	Perempuan	S1/DIV
7	Sarmadi	85229763005	Laki-laki	SLTA Sederajat
8	Isro' Agus	81386849976	Laki-laki	S1/DIV
9	Ratna Widiastuti	85870829788	Perempuan	SLTA Sederajat
10	Heru mudono	85326629182	Laki-laki	S1/DIV
11	Kuswiyono	82134579579	Laki-laki	S1/DIV
12	Dawiyah	85328090557	Laki-laki	SLTA Sederajat
13	amri ardiansyah	81227162115	Laki-laki	SLTA Sederajat
14	Fitri melita sari	85701056069	Perempuan	S1/DIV
15	Arie Budi Santosa	85647164428	Laki-laki	DI/DII/DIII
16	TRIYONO,S.A.P	81393332677	Laki-laki	S1/DIV
17	Subur Adi Purwiyoto	81227846880	Laki-laki	S1/DIV
18	Rokhman gunadi	82223900814	Laki-laki	SLTA Sederajat
19	NURODIN	85743689852	Laki-laki	S1/DIV
20	Aunur Rofiq	6,28523E+12	Laki-laki	SLTA Sederajat
21	Ariyadi	85864353645	Laki-laki	S1/DIV
22	Ismanto	81227453919	Laki-laki	SLTA Sederajat
23	Mastur hidayat	81392070996	Laki-laki	SLTP Sederajat
24	Saryudi	85869089700	Laki-laki	SLTA Sederajat
25	Tr utami	8786225110	Perempuan	S1/DIV
26	Salik	85643831111	Laki-laki	S1/DIV
27	Muhammad syaifulloh	87863840720	Laki-laki	SLTA Sederajat
28	Gunawan	82337725106	Laki-laki	S1/DIV
29	AHMADI	85729811433	Laki-laki	SLTA Sederajat
30	Sumono	82228451091	Laki-laki	SLTA Sederajat
31	KARYANTO	81393053339	Laki-laki	S1/DIV
32	Samino	85878774377	Laki-laki	DI/DII/DIII
33	Lukmanul Hakim	85747470701	Laki-laki	S1/DIV
34	Herlina Mariyani	82133509510	Perempuan	DI/DII/DIII
35	Sudarsih	82224161867	Perempuan	SLTA Sederajat
36	Suharti	81392070700	Perempuan	S1/DIV

37	TAMIYIS	85747870300	Laki-laki	SLTA Sederajat
38	ROCHANI	85709355980	Laki-laki	SLTA Sederajat
39	Ria Agustin	85641028910	Perempuan	DI/DII/DIII
40	Heni Sulistiyorini	81325045887	Perempuan	DI/DII/DIII
41	Dhoni Anggoro	81226792875	Laki-laki	S1/DIV
42	DWI ASTUTI	85842990890	Perempuan	DI/DII/DIII
43	Feri Anitasari	85290677093	Perempuan	S1/DIV
44	Deka Fitri	82243479305	Perempuan	S1/DIV
45	Herlina Mariyani	82133509510	Perempuan	DI/DII/DIII
46	Ria Agustin	85641028910	Perempuan	DI/DII/DIII
47	Rochman widiyanto	85743820522	Perempuan	SLTA Sederajat
48	Titis widy astuti	81316141951	Perempuan	S1/DIV

## 2. Data responden berdasarkan jenis kelamin

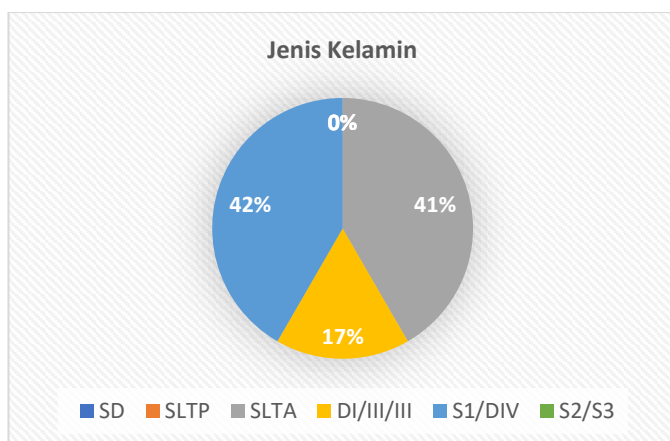
Laki-Laki	32
Perempuan	16



Dari data diatas terdapat 67% responden berjenis kelamin laki-laki dan 33% reponden berjenis kelami Perempuan.

## 3. Data responden berdasarkan tingkat Pendidikan

SD	0
SLTP	0
SLTA	20
DI/III/III	8
S1/DIV	20
S2/S3	0



Dari data diatas diperoleh data sebanyak 42% responden dengan tingkat pendidikan S1/DIV, 41% responden dengan tingkat pendidikan SLTA dan 17% responden dengan tingkat Pendidikan DI/II/III.

#### 4.2 DATA DUKUNG LAINNYA

Tabel Pengolahan Data Hasil Survei

##### Survei Persepsi Anti Koprupsi

	P1	P2	P3	P4	P5
R1	5	5	6	5	6
R2	5	5	5	5	5
R3	6	5	6	6	6
R4	6	6	6	6	6
R5	6	6	6	6	6
R6	6	5	6	5	5
R7	5	5	6	6	6
R8	6	6	6	6	6
R9	5	5	5	5	5
R10	5	5	5	5	5
R11	6	6	6	6	6
R12	5	5	5	5	5
R13	6	6	5	5	4
R14	6	5	6	6	6
R15	5	5	6	6	6
R16	5	5	5	5	5
R17	5	5	5	5	5
R18	5	5	5	5	5
R19	6	6	6	5	5
R20	5	6	5	5	5
R21	5	5	5	5	6
R22	6	5	6	6	6

R23	5	5	5	5	5
R24	5	6	5	6	5
R25	6	5	5	5	5
R26	5	5	6	5	4
R27	6	6	6	6	6
R28	6	5	5	5	4
R29	6	6	6	6	6
R30	5	6	6	5	5
R31	5	5	5	5	5
R32	6	6	6	5	6
R33	5	5	6	5	5
R34	6	6	6	6	6
R35	6	6	6	6	6
R36	5	6	5	5	5
R37	6	6	6	6	6
R38	6	6	6	6	6
R39	5	6	5	5	5
R40	5	5	6	5	5
R41	6	5	5	5	6
R42	6	6	6	6	6
R43	6	6	5	5	5
R44	4	4	5	6	4
R45	6	6	6	6	6
R46	5	5	6	6	6
R47	6	6	6	6	6
R48	5	4	4	5	5

